

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan pembahasan mendalam mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian ini. Tinjauan pustaka tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, serta untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan argumen dan analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memperkuat landasan teori yang digunakan serta memberikan kontribusi dalam merumuskan hipotesis dan tujuan penelitian yang lebih terarah dan terukur.

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah, istilah kemiskinan berasal dari kata dasar "miskin," yang berarti tidak memiliki harta benda. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ekonomi di mana seseorang mengalami kekurangan yang sangat signifikan. Ketidakmampuan ini ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Pendapatan yang rendah ini juga berdampak pada keterbatasan dalam mencapai standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan pendidikan yang layak (Herman, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menjelaskan bahwa kemiskinan dari sisi ekonomi sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan (GK), yang diukur berdasarkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Namun Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Namun, tantangan sosial-ekonomi seperti ketidakmerataan distribusi bantuan dan keterbatasan infrastruktur seringkali menghalangi efektivitas kebijakan tersebut. (Firdausy, 2020).

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (Asmanto & Adji, 2020).

Pandangan Amartya Sen tentang kemiskinan melampaui definisi materi yang sempit. Analisis Sen mengenai kemiskinan dan kelaparan, atau pentingnya kemampuan dalam memastikan kebebasan substantif manusia, berasal dari kritiknya terhadap berbagai pendekatan yang bersaing mengenai makna pembangunan dan pengukuran keberhasilan ekonomi. Sen berargumen bahwa pendekatan utilitarian, yang hanya fokus pada memaksimalkan jumlah utilitas individu (seperti kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan), sangat tidak memperhatikan distribusi antar individu dari jumlah tersebut, sehingga tidak cocok untuk mengukur kemiskinan. Teori kemiskinan Sen berakar pada 'Pendekatan Kemampuan' (*Capabilities Approach*), yang menekankan pentingnya memperluas kebebasan individu untuk berfungsi, bukan sekadar fokus pada kekayaan materi atau pendapatan (Corbridge, 2002).

#### **2.1.1.2 Jenis dan Bentuk Kemiskinan**

(Suryawati Chriswardani, 2005) membagi kemiskinan menjadi empat bentuk, yaitu:

##### **1. Kemiskinan Absolut**

Merupakan kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk dapat hidup dan bekerja.

##### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum dapat menjangkau

seluruh individu, sehingga menyebabkan sebagian orang menjadi miskin dibandingkan dengan yang lainnya.

### 3. Kemiskinan Kultural

Berkaitan dengan sikap individu yang terpengaruh oleh faktor budaya, seperti ketidakmauan untuk berusaha memperbaiki kehidupan, malas, boros, dan kurang kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak lain.

### 4. Kemiskinan Struktural

Terjadi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya dalam suatu sistem sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung perbaikan kehidupan, melainkan justru memperparah kemiskinan.

Lalu menurut (Chambers, 1995) kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan materi atau pendapatan, melainkan sebuah konsep yang terintegrasi dengan lima dimensi utama yang saling berhubungan. Dimensi pertama adalah kemiskinan (*poverty*) itu sendiri, yang mencerminkan kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan penting. Dimensi kedua, ketidakberdayaan (*powerlessness*), menggambarkan keterbatasan kemampuan individu atau komunitas untuk membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, sering kali akibat kurangnya akses terhadap informasi, pendidikan, atau peluang ekonomi. Dimensi ketiga, kerentanannya dalam menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), mencakup ketidakmampuan mereka untuk mengatasi bencana atau krisis karena terbatasnya sumber daya atau mekanisme perlindungan sosial. Ketergantungan (*dependence*), dimensi keempat, mengacu pada ketergantungan pada pihak lain untuk memenuhi

kebutuhan hidup, yang membatasi potensi untuk meraih kemandirian ekonomi. Terakhir, keterasingan (*isolation*), mencakup keterasingan baik secara geografis maupun sosioLNis, yang menghambat individu atau komunitas miskin untuk mengakses jaringan sosial, informasi, atau peluang yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, Chambers menggambarkan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek, melainkan sebagai siklus yang saling mempengaruhi dan membutuhkan pendekatan yang holistik untuk diatasi.

Di Indonesia sebagai negara berkembang yang terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah kebijakan sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain Bantuan Sosial Pangan Non-Tunai, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Dana Desa yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang berbeda. Upaya ini mencakup kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan langsung kepada masyarakat miskin, tetapi juga pada redistribusi aset dan pengeluaran publik yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas kepemilikan di kalangan masyarakat miskin. Selain itu, penyediaan barang publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh (Todaro & Smith, 2020) dalam *Economic Development*, kebijakan yang terintegrasi ini dapat berperan signifikan dalam menurunkan tingkat

kemiskinan, mempercepat pembangunan manusia, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah yang terstruktur dan terkoordinasi menjadi sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, dan hal ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## **2.1.2 Bantuan Pangan Non Tunai**

### **2.1.2.1. Latar Belakang Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BSPNT)**

Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BSPNT) dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin. BSPNT merupakan transformasi dari program bantuan Rastra (Beras untuk Keluarga Sejahtera) yang mulai diterapkan pada tahun 2017. Program ini menggunakan mekanisme penyaluran bantuan berbasis nontunai untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran bantuan (Kurniawan et al., 2023).

### **2.1.2.2. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BSPNT)**

Dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021, program ini bertujuan untuk:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui transaksi nontunai

#### **2.1.2.3. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BSPNT)**

BSPNT yang diatur melalui beberapa regulasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mewajibkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin, termasuk bantuan pangan non-tunai. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 mengatur penyaluran bantuan sosial secara non-tunai melalui sistem perbankan atau teknologi keuangan, dengan program Bantuan Sosial Pangan Non-Tunai (BSPNT) yang menggunakan kartu elektronik untuk membeli bahan pangan di tempat yang ditentukan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, target penerima, serta pencairan dan pelaporan yang melibatkan bank-bank mitra Kementerian Sosial.

#### **2.1.2.4. Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BSPNT)**

Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Non-Tunai (BSPNT) bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar melalui distribusi non-tunai yang efektif dan efisien. Program ini dirancang untuk memenuhi enam kriteria penting yang dikenal dengan istilah 6T, yaitu *Targeted*, *Administrative Accuracy*, *Timeliness*, *Targeted Beneficiaries*, *Benefits Accuracy*, dan *Quality Accuracy*. Dalam praktiknya, BSPNT memberikan bantuan berupa barang-barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan daging dengan nilai bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan yang dapat digunakan oleh keluarga

penerima manfaat untuk membeli kebutuhan pokok di jaringan e-warung yang telah ditentukan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menciptakan kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah masalah akurasi penargetan penerima manfaat. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan, sementara ada pula yang seharusnya berhak malah tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem penargetan dan pemutakhiran data penerima manfaat menjadi sangat penting agar program BSPNT dapat lebih tepat sasaran, lebih efektif dalam mencapai tujuannya, dan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang membutuhkan (Pangemanan et al., 2023).

### **2.1.3 Bantuan Operasional Sekolah**

#### **2.1.3.1. Latar Belakang Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan dana BOS menjadi aspek krusial, yang melibatkan perencanaan anggaran, pengelolaan, dan pengawasan dana dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti rendahnya motivasi guru untuk mengikuti pengembangan profesional dan



kurangnya kompetensi yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. (Tahim et al., 2023).

#### **2.1.3.2. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Tujuan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk menyediakan dukungan finansial bagi sekolah-sekolah di Indonesia, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah agar terciptanya akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat. Berikut dalam (Nursiniah et al., 2024) beberapa tujuan utama dari program ini:

1. Membebaskan Biaya Pendidikan: Program BOS bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga semua anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Dana BOS digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas, penyediaan alat peraga, dan pengembangan kurikulum. Ini termasuk mendanai pelatihan guru dan kegiatan belajar mengajar.
3. Mendukung Operasional Sekolah: Dana ini berfungsi sebagai sumber utama untuk membiayai pengeluaran non-personalia, seperti biaya operasional sekolah, gaji guru honor, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan: Dengan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, program ini berkontribusi pada

peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung.

5. Menanggapi Kebutuhan Darurat: Dana BOS juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak akibat bencana alam.
6. Mendorong Kerjasama: Program ini mendorong kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

#### **2.1.3.3. Dasar Hukum Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Program BOS mendukung pembiayaan operasional non-personalia untuk sekolah dasar dan menengah, dengan fokus pada siswa kurang mampu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2021 memberikan panduan teknis penggunaan dana BOS reguler untuk kebutuhan operasional sekolah, Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 mengatur pendanaan pendidikan, termasuk dana BOS sebagai bagian dari skema yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pendidikan berkualitas. Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.07/2021 menetapkan mekanisme penyaluran BOS sebagai bagian dari APBN melalui Transfer ke Daerah, yang dilakukan dalam tiga tahap setiap tahun anggaran. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar bagi seluruh kebijakan terkait pendanaan pendidikan, termasuk program BOS yang bertujuan untuk menjamin akses pendidikan gratis atau terjangkau. Selain itu,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 menetapkan bahwa dana BOS hanya disalurkan ke sekolah-sekolah yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah melaporkan data siswa melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memastikan akurasi dan verifikasi data sebagai syarat penyaluran.

#### **2.1.3.4. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dengan memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk operasional sekolah. Meskipun program ini dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi sekolah dan masyarakat, tantangan dalam pengelolaan dana BOS masih ada, terutama terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian (Maimunah & Elgina, 2023) menunjukkan bahwa banyak sekolah belum sepenuhnya mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan, yang mengakibatkan rendahnya transparansi dalam laporan penggunaan dana. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan dana BOS..

### **2.1.4 Bantuan Operasional Kesehatan**

#### **2.1.4.1. Latar Belakang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) lahir sebagai respons pemerintah terhadap tantangan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Dalam upaya mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) dan menurunkan kesenjangan pelayanan kesehatan, program ini dirancang untuk memberikan dukungan pendanaan

operasional kepada fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas dan jaringannya. Masih tingginya hambatan ekonomi dan geografis yang menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur kesehatan di daerah-daerah tertinggal. Melalui bantuan ini, pemerintah berupaya mendorong pemerataan akses kesehatan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan (Annida, 2020).

#### **2.1.4.2. Tujuan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Berdasarkan dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015, tujuan dari program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah:

Tujuan :

Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional, khususnya *Millennium Development Goals* (MDGs) bidang kesehatan tahun 2015.

#### **2.1.4.3. Dasar Hukum Bantuan Operasional Kesehatan**

BOK memiliki dasar hukum kuat, mulai dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat, hingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendukung peran pemerintah pusat dalam penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOK, termasuk rincian kegiatan,

mekanisme pengajuan, dan pelaporan penggunaan dana. Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 dan Nomor 197/PMK.07/2020 memastikan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Penyaluran dana BOK disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai berbagai operasional seperti pembelian obat, pemeliharaan fasilitas, dan insentif tenaga kesehatan.

#### **2.1.4.4. Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Implementasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penelitian (Nuryana et al., 2023) melibatkan tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pencatatan serta pelaporan. Pada tahap perencanaan, dilakukan mini lokakarya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lintas sektor, untuk merancang penggunaan dana dan menetapkan program prioritas, seperti penurunan angka kematian ibu dan anak serta stunting. Pelaksanaan kegiatan BOK berusaha memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh dinas kesehatan, meskipun seringkali terhambat oleh keterlambatan pencairan anggaran

#### **2.1.5 Dana Desa**

##### **2.1.5.1. Latar Belakang Dana Desa**

Kebijakan program Dana Desa di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kesenjangan pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 43% dari total penduduk Indonesia tinggal di desa, sementara 91% dari wilayah Indonesia merupakan area pedesaan. Meskipun jumlah penduduk desa cukup besar, sekitar 10,14% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis

kemiskinan, dengan sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Oleh karena itu, melalui Dana Desa, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan mempercepat pembangunan di desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta memberdayakan desa agar lebih mandiri dalam mengelola potensi lokal dan mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada (Permatasari et al., 2021).

#### **2.1.5.2. Tujuan Program Dana desa**

Tujuan Program Dana Desa, yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam (Mohammad et al., 2020) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa aspek utama:

1. Peningkatan Layanan Publik Program ini bertujuan untuk memperbaiki layanan publik di daerah pedesaan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih baik.
2. Pengentasan Kemiskinan: Salah satu fokus utama dari Dana Desa adalah mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Desa: Dana Desa diarahkan untuk mempromosikan ekonomi desa, termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.
4. Mengatasi Ketimpangan Pembangunan: Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan daerah perkotaan, serta antar desa itu sendiri.

5. Penguatan Komunitas Desa: Dana Desa juga bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan.

#### **2.1.5.3. Dasar Hukum Dana desa**

Dasar hukum utama yang mengatur Dana Desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. UU ini juga menegaskan pentingnya kemandirian desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengalokasian Dana Desa diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang mengatur sumber dan penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 yang menetapkan mekanisme penyaluran dan pengelolaan Dana Desa secara rinci. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa agar dapat tepat sasaran, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 memberikan panduan operasional tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa. Sinergi regulasi ini memastikan bahwa Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa.

#### 2.1.5.4. Implementasi Program Dana desa

Implementasi Dana Desa di Indonesia merupakan upaya untuk memanfaatkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa ditetapkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Namun, di Desa Kadongdong, dalam penelitian (Abdurrahman Arif & Arif Rahman Hakim, 2023) terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dana desa, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah desa dan warga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

#### 2.1.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya atau yang sudah ada, yang berkaitan dengan isu-isu yang akan diteliti oleh peneliti, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

***Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu***

| No. | Penelitian, Tahun, Judul Penelitian                                         | Persamaan        | Perbedaan             | Hasil Penelitian                                                | Sumber Referensi                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)              | (4)                   | (5)                                                             | (6)                                                   |
| 1   | Gusti Pratiwi, Safuridar Safuridar, dan Martahadi (2022) - Pengaruh Belanja | • Bantuan Sosial | • Pertumbuhan Ekonomi | Belanja bantuan sosial di Kabupaten Langkat berpengaruh negatif | Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.1, No.4 Desember 2022 |



| No. | Penelitian, Tahun, Judul Penelitian                                                                                                                                                       | Persamaan                  | Perbedaan                   | Hasil Penelitian                                                                                                   | Sumber Referensi                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                       | (3)                        | (4)                         | (5)                                                                                                                | (6)                                                                             |
|     | Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat                                                                                                   |                            |                             | dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien regresi - 0,152960 dan nilai signifikan 0,1514 (>0,05). |                                                                                 |
| 2   | Lilik Rodhiatun Nadhifah, Nur Huri Mustof (2021)- Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi                                          | • Bantuan Pangan Non Tunai | • PKH                       | Bantuan sosial efektif menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.                                            | Journal of Islamic Economics and Banking, 2021                                  |
| 3   | Suarni et al. (2022) - Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, BPNT, dan BST terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan                                                            | • Bantuan Pangan Non Tunai | • PKH<br>• BST              | BPNT tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan.                                                                 | Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan, 4(1), 2022                           |
| 4   | Tri Angga Sigit, Ahmad Kosasih (2020) - Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Kabupaten/Kota di Indonesia                                                                         | • Dana Desa                | •                           | Dana Desa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan                                                 | Indonesian Treasury Review, 5(2), 2020                                          |
| 5   | Ristanto Abdullah (2022) - Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo                                                                                                    | • Dana Desa                |                             | Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo.                                 | Jambura Economic Education Journal, 4(2), 2022                                  |
| 6   | Fitriah P. Cita et al. (2020) - The Influence of Village Fund and Its Allocation on Poverty Levels in Isolated Areas in Batulanteh District                                               | • Dana Desa                | • ADD                       | Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah terpencil.                                  | Proceedings of the 1st Annual Conference on Education and Social Sciences, 2020 |
| 7   | Bernadeth Y.P. Simangunsong, Charitin Devi (2023) - Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara                                                                             | • Pendidikan               | • Pengangguran<br>• inflasi | Anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan,                                            | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 3(1), 2023                      |
| 8   | Athoridho Handyton et al. (2022) - Analysis of the Effect of the Smart Indonesia Program, School Operational Assistance and Cashless Food Assistance on Reducing Poverty in North Sumatra | • BOS<br>• BPNT            | • PIP                       | BOS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, BPNT negatif tetapi tidak signifikan,                      | Advances in Social Sciences Research Journal, 9(7), 2022                        |
| 9   | Paulo Grasiano Izaak Kawatu et al. (2020) - Pengaruh Dana                                                                                                                                 | • BOS                      |                             | Dana BOS berpengaruh                                                                                               | Jurnal Pembangunan                                                              |

| No. | Penelitian, Tahun, Judul Penelitian                                                                                                             | Persamaan                                                                                              | Perbedaan                                                      | Hasil Penelitian                                                                            | Sumber Referensi                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                             | (3)                                                                                                    | (4)                                                            | (5)                                                                                         | (6)                                      |
|     | BOS terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                | signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.                                           | Ekonomi dan Keuangan Daerah, 21(1), 2020 |
| 10  | Edward Zubir et al. (2023) - Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan, Pendidikan, dan Pariwisata terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Kesehatan,</li> <li>• Anggaran Pendidikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pariwisata</li> </ul> | Anggaran kesehatan, pendidikan, berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.         | Jurnal Ekombis Review, 11(2), 2023       |
| 11  | Darwin Hartono (2023) - Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Kesehatan,</li> <li>• Anggaran Pendidikan</li> </ul> |                                                                | Anggaran kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. | Jurnal Mirai Management, 8(1), 2023      |
| 12  | Judith Kabajulizi et al. (2020) - The Welfare Implications of Public Healthcare Financing in Uganda                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>                      |                                                                | Pendanaan kesehatan publik berpengaruh mengurangi kemiskinan secara signifikan.             | Health Policy and Planning, 32(10), 2020 |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, disusunlah kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan.

### 2.2.1 Hubungan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2022; Sigit & Kosasih, 2020) Program Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Langkat, berbeda halnya dengan penelitian (Nadhifah & Mustofa, 2021) di Pucakwangi Pati Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan

nilai koefisien sebesar  $-2.82E-07$  dan tingkat signifikansi 0.0167. Penelitian lain oleh (Suarni et al., 2022) juga sejalan temuan tersebut, yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan BPNT dalam tingkat kemiskinan di desa-desa di Kabupaten Barru. ketiga penelitian ini mengindikasikan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memberikan akses pangan yang lebih stabil bagi keluarga penerima manfaat.

### **2.2.2 Hubungan Bantuan Operasional Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan**

penelitian yang dilakukan oleh (grasiano et al., 2020) menjelaskan bahwa anggaran dana bantuan operasional sekolah yang ada di sulawesi utara, khususnya daerah kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongodow memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handyton et al., 2022) yang menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sumatera Utara memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda halnya dengan penelitian (Rahmayani & Andriyani Devi, 2022) di Sumatera yang menjelaskan bahwa dana bantuan pendidikan atau dana bantuan operasional sekolah tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel kemiskinan.

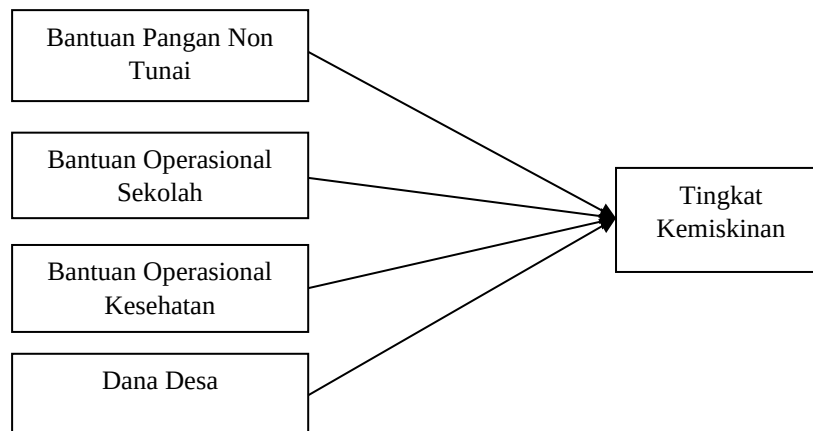
### **2.2.3 Hubungan Bantuan Operasional Kesehatan Terhadap Tingkat**

#### **Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian (Edward Zubir, 2023) dan (Kabajulizi et al., 2020), realisasi anggaran kesehatan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hartono, 2023) yang juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran kesehatan dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, yang memperkuat argumen bahwa pengalokasian anggaran kesehatan yang lebih besar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan di suatu negara.

#### **2.2.1 Hubungan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan**

Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sigit & Kosasih, 2020) tingkat kabupaten/kota di Indonesia dan (Abdullah et al., 2022) di Gorontalo. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Cita et al., 2020) juga mengungkapkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa alokasi dan pemanfaatan dana desa yang tepat dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan.



*Gambar 2. 5 Kerangka Berpikir*

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023
2. Diduga secara bersama-sama bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023